

EKSISTENSI NILAI-NILAI FILOSOFI KEBANGSAAN DALAM KEPEMIMPINAN NASIONAL

Oleh : M. Nur Alamsyah¹

ABSTRAK

Kepemimpinan nasional yang terbangun dalam cara pandang, strategi, pilihan kebijakan dan orientasi sebagai proses dalam mencapai tujuan negara semestinya harus berorientasikan nilai Pancasila didalamnya. Ini merupakan perwujudan dari esensi nasionalisme yang menempatkan mekanisme kepemimpinan nasional sebagai perwujudan dari proses kedaulatan yang terlegitimasi oleh rakyat.

Keutuhan implemmentasi nilai tersebut, harus terdapat pada seluruh komponen kepemimpinan bangsa baik formal maupun informal sehingga mengukuhkan sinergitas proses kepemimpinan yang dapat membawa suasana kedamaian yang menciptakan keamanan sehingga setiap masyarakat dapat beraktifitas secara baik sehingga akan mampu mencapai tahapan kesejahteraan yang merupakan cita-cita nasional Indonesia. Kondisi yang diciptakan dari mekanisme tersebutlah yang dapat mewujudkan kepemimpinan nasional yang kokoh yang dapat diterima oleh seluruh lapisan dan berbagai komponen masyarakat yang ada.

Kata kunci: Pancasila, Kepemimpinan, Nasional

PENDAHULUAN

Esensi utama sebuah kepemimpinan menurut Blanchard (dalam Wahyusumidjo; 1987, 21) adalah tercapainya tujuan melalui kerja sama kelompok. Pendapat tersebut dalam konteks kehidupan sebagai

¹ M. Nur Alamsyah, SIP.,M.Si adalah Dosen prodi Ilmu Pemerintahan Fisip Untad

sebuah bangsa, dikemukakan Ernest Renan sebagai Konsepsi kebangsaan modern pada Abad 19 di Eropa mengatakan bahwa bangsa adalah keinginan untuk bersama. Penekanan pada kata bersama, tentunya merupakan permufakatan oleh masyarakat bangsa tersebut, yang dituangkan dalam bentuk identitas-identitas kebangsaan maupun berupa simbol-simbol sebagai nilai-nilai dasar dalam menuju satu cita-cita². Identitas tersebut dalam kontek ke Indonesiaan, dituangkan dalam Pancasila dan UUD 1945 sebagai pedoman dan arah pandang bangsa Indonesia.

Penciptaan Kepemimpinan nasional yang tangguh adalah sesuatu yang teramat sulit, terutama terkait dengan obyek yang menjadi pengelola kepemimpinan tersebut didalamnya adalah manusia. Secara psikologis, manusia secara individu tergantung dari motivasi akan pemenuhan kebutuhan dirinya sebagai makhluk politik (*Zoon Politicon*). Di Indonesia saat ini, para pemimpin kaitannya dengan masyarakat mengalami kondisi dimana kepercayaan yang rendah dari masyarakat (*distrust*). Ketidakpercayaan pemimpin ini, tidak hanya terjadi pada level nasional, namun juga pada level lokal.

Cita-cita nasional Indonesia dalam perjalanan kehidupan kebangsaannya yang harus dapat diwujudkan dan untuk dapat tercapainya tujuan nasional. Cita-cita tersebut, sebagaimana tertuang dalam Alinea 2 Pembukaan UUD 1945, yaitu bangsa merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur yang jadi substansi kegiatan kebangsaan sebagai kepentingan nasional (*national interests*) dengan adanya kepentingan keamanan (*security*) dan kepentingan kesejahteraan (*prosperity/welfare*) dalam masyarakat³. Dengan kata lain bahwa kedua hal tersebut adalah keadan yang harus diciptakan

² Konsep ini seperti yang dituangkan dalam Kontrak Sosial oleh JJ, Rosseau

³ Buku Materi Lemhannas PPRA XLII, 2008. Aktualisasi Astagatra Dalam Pembangunan Nasional hlm. 5

dalam mekanisme kebangsaan dengan menekankan pada aspek keamanan sebagai prioritas utama.

Korelasi antara nilai ideologi dan kepemimpinan pada sebuah bangsa adalah hubungan antara sistem dan subsistemnya. Ideologi, dalam hal ini Pancasila sebagai perwujudan citra diri bangsa sebagai sistem utama, sedangkan kepemimpinan sebagai subsistem yang merupakan proses didalamnya, dan Keduanya tak dapat dipisahkan. Alat utama bangsa dalam mencapai tujuan yang diinginkan adalah pada proses kepemimpinan, yang berintikan adanya keinginan untuk bersama yaitu kesadaran bahwa bangsa merupakan sebuah keutuhan yang terdiri dari berbagai komponen yang harus saling menopang dan mendukung dalam mencapai cita-cita dan tujuan nasional.

Inkonsistensi yang terjadi dewasa ini yang terjadi pada hampir seluruh aktifitas kehidupan kebangsaan, merupakan wujud tidak konsistennya implementasi nilai-nilai pancasila dalam pola kehidupan kebangsaan Indonesia. Maraknya kekacauan yang bersifat vertikal dan horizontal, KKN dimana-mana, bahkan yang tragis adalah pembangkangan atas otoritas kepemimpinan dimana tidak jarang kita dengar pejabat ataupun pemimpin yang dimaki oleh masyarakat atau bawahannya yang lebih celaka adalah upaya tindakan yang menjurus kepada kriminal yang dapat mencekakan kedua belah pihak.

Mengapa proses dan kondisi yang diciptakan oleh kepemimpinan hingga kini, tidak mampu mencapai suasana yang aman, tentram, adil, makmur dan sejahtera. Hal ini merupakan indikasi bahwa kehidupan kebangsaan kita tidak terimplementasi didalamnya inti sari ajaran moral kepemimpinan yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Kealpaan ini keluar dari prinsip dan substansi dasar Konsepsi kebangsaan modern yang menekankan pada keutuhan “kebersamaan” seperti yang dikemukakan di atas.

KEHARUSAN IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA

Pancasila bukan dimaksudkan sebagai hanya sebatas konsep, melainkan sebagai sebuah nilai. Sebuah nilai yang harus dihayati, dipedomani dan dijadikan arahan bagi seluruh komponen bangsa dalam menjalani kehidupannya. Pengertian nilai jika meminjam istilah dalam kajian Filsafat menunjukkan kata benda abstrak yang artinya keberhargaan (*worth*) atau kebaikan (*goodness*) dan kata kerja yang berarti suatu tindakan kejiwaan tertentu dalam menilai atau melakukan penilaian.⁴

Pengertian lain bahwa nilai adalah kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia, atau sifat dari suatu benda yang menyebabkan menarik minat seseorang atau kelompok (*The Believed Capacity Of Any Object To Satisfy A Human Desire*). Atau lebih lanjut dikemukakan Kaelan bahwa nilai pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek, bukan objek itu sendiri dengan kata lain suatu itu mengandung nilai, artinya terdapat sifat atau kualitas yang melekat pada sesuatu itu⁵.

Nilai Pancasila sebagai falsafah hidup anak bangsa, menginginkan agar moral Pancasila menjadi *moral kehidupan negara* dalam arti menuntut penyelenggara dan penyelenggaraan negara menghargai dan mentaati prinsip-prinsip moral atau etika politik⁶. Esensi nilai dimaksud adalah bagaimana pengembangan, peningkatan pemahaman, penjabaran, pemasyarakatan, dan pengimplementasiannya dalam pengertian penerapannya pada seluruh aktifitas kebangsaan, Ada tiga ciri khas dimensi minimal,

⁴ Frankena;229;dalam Kaelan, 2004;87

⁵ Ibid

⁶ Prof. Dr. Soerjanto Poespowardojo dkk, 2006 (BS Pancasila dan UUD 1945), Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, Lemhannas, Jakarta, 2006.tanpa hlm.

yaitu a) Dimensi teleologis bahwa pembangunan mewujudkan cita-cita Proklamasi 1945, prinsip bahwa kondisi hidup bangsa tidak hanya ditentukan nasib, tetapi tergantung rahmat Tuhan YME dan usaha manusia. b). Dimensi etis, ciri ini menunjukkan bahwa dalam Pancasila, martabat manusia menempati posisi sentral. Pembangunan diarahkan untuk mengangkat derajat manusia melalui penciptaan kehidupan manusiawi, dimana harus mewujudkan dalam keadilan masyarakat diberbagai aspek kehidupan. Disamping, manusia pun dituntut bertanggung jawab atas usaha dan upaya yang dilakukannya, sebab dimensi etis menuntut pembangunan yang bertanggung jawab. c). Dimensi integral-integratif, dimana menempatkan manusia tidak secara individualistis melainkan dalam konteks strukturnya. Manusia adalah pribadi, namun juga relasi karena itu, manusia harus dilihat dalam keseluruhan sistem yang meliputi masyarakat, dunia, dan lingkungannya. Pembangunan diarahkan tidak saja untuk peningkatan kualitas manusia, tetapi juga peningkatan kualitas stukturnya. Dengan wawasan utuh seperti itu, keseimbangan hidup bisa terjamin⁷.

Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang menganut prinsip-prinsip demokrasi dalam pengelolaan negaranya sebagaimana dituangkan dalam sila keempat dari Pancasila. Untuk itu, Pancasila sebagai Pandangan hidup atau *Weltanschauung*, yaitu pandangan dunia atau *way of life* yaitu cara menjalani kehidupan. Walaupun istilahnya berbeda, tetapi mempunyai arti yang sama. Sebagai falsafah hidup atau pandangan hidup, Pancasila mengandung wawasan tentang hakikat, asal, tujuan, nilai, dan arti dunia seisinya, terutama bagi manusia dan kehidupannya baik secara perorangan maupun sosial secara general dalam menjalankan

⁷ Prof. Dr. Soerjanto Poespowardojo dkk, 2008. (BS. Pancasila dan UUD 1945) **Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka dan Ideologi Nasional**, Lemhannas, Jakarta.

prinsip-prinsip demokrasi dengan saling terintegrasi. Sehingga menjadi falsafah kepemimpinan bangsa yang mencerminkan konsepsi menyeluruh dengan menempatkan harkat dan martabat manusia sebagai faktor sentral dalam kedudukannya yang fungsional terhadap segala sesuatu yang ada.

Falsafah Hidup Bangsa mencerminkan konsepsi yang menyeluruh dengan menempatkan harkat dan martabat manusia sebagai faktor sentral dalam kedudukannya yang fungsional terhadap segala sesuatu yang ada. Kandungan ini, sebagai nilai yang intrinsik dalam nilai-nilai Pancasila merupakan bagian utuh yang ada dalam esensi kepemimpinan Pancasila.

Menurut Abraham Maslow, esensi hidup manusia terdapat pada tahapan yang hendak dicapai (teori lima hirarki kebutuhannya) yaitu kebutuhan akan: fisiologis, keamanan, kasih sayang, prestise dan pengembangan potensi diri⁸. Kebutuhan tersebut, akan tergantung dari kebutuhan, kemampuan, kesempatan dan lingkungan yang mengitarinya. Dengan demikian dalam upaya implementasi Pancasila pada setiap individu, senantiasa memperhatikan pada tahap kebutuhan yang mana saat ini dia berada.

Terimplementasinya secara baik nilai-nilai Pancasila, akan mengukuhkan dengan tegas arah pencapaian cita-cita dan tujuan nasional secara berkesinambungan dalam kehidupan yang senantiasa dinamis dan mengalami berbagai modifikasi dalam pencapaiannya melalui perwujudan kepemimpinan nasional yang mantap sebab seluruh proses yang ada dalam pengelolaan negara senantiasa diilhami oleh nilai-nilai Pancasila, yang merupakan kerangka nilai yang substantif dalam kedudukannya sebagai pandangan hidup bagi bangsa Indonesia.

⁸ Sondang p. Siagian, cet ketiga 2003. teori dan praktek kepemimpinan, rineka cipta, jakarta, hlm. 170-172

Fenomena kebangsaan yang terjadi saat ini adalah mandegnya mekanisme yang memungkinkan terimplementasikannya nilai-nilai kepemimpinan pancasila dalam kehidupan kebangsaan. Permasalahan klasik yang menjadi dinamika dunia adalah cepatnya transformasi ideologi global memasuki ruang-ruang kesadaran masyarakat dunia termasuk Indonesia. Penekanan penting ideologi baru yang ditawarkan dengan kebebasan sebagai janji utama, membawa sikap dasar manusia untuk kembali ke hakekat dasarnya sebagai Zoon Politicon. Hal ini melahirkan sikap-sikap yang pragmatis pada para pemimpin bangsa yang cenderung Hedonis yang memanfaatkan sikap mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari posisi yang menjadi kewenangannya.

Sejarah telah mencatatkan bangsa Indonesia bahwa, pengaruh ideologi global menjadi variabel yang menyebabkan tidak terimplementasikannya dengan baik nilai-nilai pancasila. Beberapa era kepemimpinan nasional yang telah berlalu menunjukkan hal tersebut. Selalu terdapat inkonsistensi dalam pengejawantahan nilai pancasila yang selalu mengalami posisi diskredit yang luas. Terlihat perjalanan Pancasila sejak orde lama hingga orde Reformasi saat ini, menciptakan nuansa yang selalu dilematis dalam ketidak konsistenan berbagai komponen bangsa dalam mengimplementasikannya.

Keadaan tersebut, menjelaskan bahwa wawasan dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila secara kultural yang mestinya telah tertanam dalam hati sanubari, watak, kepribadian, dan mewarnai kebiasaan, perilaku serta kegiatan lembaga-lembaga masyarakat tidak berlangsung secara baik. Nilai-nilai pancasila dapat terlihat pada kelima nilai dasar yang tercakup dalam Pancasila, yang merupakan inti harapan yang memberikan makna hidup dan sekaligus tuntunan serta tujuan hidupnya, bahkan jadi ukuran dasar atas kehidupan bangsa. Pancasila merupakan cita-cita moral bangsa

Indonesia, yang mengikat seluruh warga masyarakat baik sebagai perorangan maupun sebagai kesatuan bangsa dalam mencapai tujuan atau cita-cita kebangsaannya mencapai masyarakat adil makmur dan sejahtera.

Kelemahan mendasar atas implementasi nilai-nilai Pancasila ini adalah tidak konsistennya mekanisme kenegaraan menetapkan satu platform dasar untuk melakukan sosialisasi, mediasi dan dinamisasi atas nilai-nilai Pancasila sehingga memiliki metode dan cara yang dapat berguna bagi masyarakat bangsa. Hilangnya pemahaman Pancasila, akan menghilangkan potensi ketahanan bangsa dimana pelebagaan pembinaan ideologi bangsa saat ini, dikelola oleh lembaga dan orang-orang yang secara prinsipil tidak memiliki kompetensi, kualitas dan kapabilitas untuk membangun kesadaran rasional terhadap identitas kebangsaan, utamanya di daerah yang relatif tertinggal.

KONGKRETISASI PERWUJUDAN KEPEMIMPINAN NASIONAL YANG KOKOH

Berbagai peristiwa pemerintahan yang merupakan bagian dari kepemimpinan nasional terjadi sebagai out put dari sistem kepemimpinan yang ada. Dalam berbagai kesempatan, terlihat betapa sikap keteladanan dan tingkat kepercayaan yang ditunjukkan oleh masyarakat merupakan kongkretisasi melemahnya eksistensi nilai identitas kebangsaan. Prinsip kepemimpinan dalam falsafah budaya bangsa Indonesia adalah senantiasa dimaknai secara sakral. Hal ini menyebabkan terdapat rasa keengganan dalam melakukan berbagai penyimpangan ataupun pengaduan atas kondisi yang terjadi.

Konsepsi kepemimpinan nasional secara hakiki semestinya telah memahami prinsip demokrasi yang diisi dengan nilai-nilai filosofis dari Pancasila. Implementasi secara baik tersebut akan menjadi satu keutuhan yang sinergis, sistematis dan terarah dalam menjalankan

visi dan orientasi untuk mencapai cita-cita bangsa sesuai arah pembentukan negara Indonesia. Menurut Paige (dalam Ryass, 1995) mengemukakan bahwa ada 6 (enam) variabel penting dalam studi tentang kepemimpinan yaitu kepribadian, peranan, organisasi, tugas, nilai-nilai dan lingkungan. Pendapat ini jika dikaitkan antara Nilai kepemimpinan pancasila dan implementasinya dalam mewujudkan kepemimpinan nasional yang mantap adalah sangat erat.

Perwujudan kepemimpinan nasional merupakan syarat untuk dimungkinkannya pencapaian cita-cita nasional. Ini ditentukan oleh adanya persepsi, wawasan dan profesionalisme yang diatur melalui peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis dan kebijaksanaan operasional yang menjadi tanggung jawabnya baik secara struktural maupun fungsional. Dengan kata lain bahwa dibutuhkan kepemimpinan nasional yang efektif untuk dapat mengendalikan jalannya organisasi bangsa dalam bentuk negara, sehingga negara dapat dipertahankan untuk berada pada jalur yang benar (*on the track*).

Kepemimpinan meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Kepemimpinan mempunyai kaitan yang erat dengan motivasi. Hal tersebut dapat dilihat dari keberhasilan seorang pemimpin dalam menggerakkan orang lain dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan yang sangat tergantung kepada kewibawaan, dan juga pimpinan itu dalam menciptakan motivasi dalam diri setiap orang yang diperintah, mitra kerja, maupun atasan dari pimpinan itu sendiri.

Kepemimpinan sebagai proses membentuk pemimpin dengan karakter dan watak jujur terhadap diri sendiri (*integrity*), bertanggung jawab yang tulus (*compassion*), pengetahuan (*cognizance*), keberanian bertindak sesuai dengan keyakinan

(*commitment*), kepercayaan pada diri sendiri dan orang lain (*confidence*) dan kemampuan untuk meyakinkan orang lain (*communication*). Kepemimpinan juga merupakan proses membentuk seorang pengikut (*follower*) yang didalam kepatuhannya kepada pemimpin, akan tetapi memiliki pemikiran kritis, inovatif, dan jiwa independen yang didalamnya terimplementasikan identitas nasional bangsa yaitu nilai Pancasila.

Secara etik budaya, selalu ada mekanisme yang santun dan apik yang diberikan dan terdapat dalam mekanisme budaya ke Indonesiaan. Hal ini dikarenakan dalam identitas kepemimpinan dan pemimpin tersebut melekat nilai yang merupakan pengejawantahan dari eksistensi kebaikan (*goodness*) dan keberhargaan (*worth*) dimana dengan keyakinan tersebut meletakkan pemimpin sebagai panutan sehingga melahirkan relasi sosial budaya yang percaya (*trust*) dalam implementasinya. Fenomena empirik yang terwujud saat ini, adalah adanya pengingkaran dalam mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam perwujudan kerja yang dilakukan oleh mekanisme kepemimpinan saat ini.

Dibutuhkan perwujudan kepemimpinan nasional yang mantap untuk dapat terciptanya dan mengembalikan kehidupan kebangsaan yang terkelola sesuai esensi implementasi nilai-nilai intrinsik yang terdapat dalam kepemimpinan sehingga dapat tercipta pengelolaan kehidupan kebangsaan secara baik. Konsekwensi atas perwujudan kepemimpinan nasional yang kurang baik, akan menjelma menjadi bentuk pengelolaan kehidupan kebangsaan menjadi tanpa kendali sehingga dapat menciptakan kekacauan bahkan dalam konteks kenegaraan akan memungkinkan munculnya sikap-sikap yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar pembentukan bangsa seperti sikap federalis atau bahkan makar untuk memecah belah bangsa. Hal ini karena hilangnya esensi nilai yang terbangun sebagai kesepahaman inti dalam nilai-nilai kepemimpinan nasional, yang berlaku secara umum.

Setiap bangsa yang memiliki sejarah, budaya, dan lingkungan yang mengitarinya masing-masing memiliki gaya ataupun metode yang lebih dapat diterima secara umum dalam mewujudkan kepemimpinan bangsanya. Kondisi tersebut, melahirkan gaya kepemimpinan nasional secara umum tidak lepas acuan dari pakar teori yang ditulis Gabriel A. Almond dalam bukunya yang berjudul "Comperative Politics" Tahun 1976) yang memberikan kategorisasi jenis orientasi gaya Kepemimpinan Nasional yaitu:

- 1) Gaya kepemimpinan berorientasi ideologi (*Ideology oriented style*).
- 2) Gaya kepemimpinan berorientasi pragmatik (*Pragmatic oriented style*).
- 3) Gaya kepemimpinan berorientasi pada nilai-nilai absolut tradisional (*absolute value and traditional oriented style*).

Jika membandingkan gaya diatas, maka gaya kepemimpinan nasional Indonesia dari *ketiga* gaya diatas perlu dielaborasi tersendiri untuk dapat menjadi gaya kepemimpinan khas, dengan pijakan fundamentalnya pada intisari budaya nasional. Identitas budaya bangsa yang dimaksud adalah ideologi yang menjadi komitmen kebangsaan sebagai filter nilai ditengah percaturan global (liberalisme dan kapitalisme) dalam hal ini Pancasila. Posisi pancasila tersebut, baik sebagai ideologi negara, falsafah hidup berbangsa bernegara atau sebagai pandangan hidup bangsa, untuk dapat menghadapi tantangan nasional, regional dan global dewasa ini.

Terjadinya banyak kasus yang menunjukkan hilangnya rasa terdalam sebagai sosok pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya di Indonesia mengingat integritas moralitas dimana kepemimpinan itu dibangun diatas nilai esensial religiusitas.⁹ Dengan demikian, filosofi kepemimpinan bukanlah tujuan yang

⁹ Baca Muladi & Adi Sujatno, Traktat etis Kepemimpinan Nasional, RM. Books, Jakarta, 2008 hlm.9-20

hendak dicapai melainkan proses yang menjadi perantara mencapai tujuan yang diinginkan dalam mewujudkan terciptanya keadilan di masyarakat.

Berbagai kasus yang terjadi dalam kehidupan kemasyarakatan bangsa Indonesia, merupakan pengingkaran atas esensi kepemimpinan nasional yang kukuh dalam nilai-nilai Pancasila. Ajaran pemimpin besar seperti Gandhi dengan pandangan untuk menjadi seorang pemimpin yang baik adalah dengan memahami *Satyagraha* (kepatuhan pada kebenaran), *Swadesi* (cinta tanah air) dan *Ahimsa* (pantang menggunakan kekerasan). *Satyagraha* dimaknai tidak hanya pantang melanggar janji dan perkataan yang pernah diucapkan (satya wacana) melainkan kepatuhan menjalankan secara utuh prinsip moral pemimpin, atau swadesi bukanlah pemaknaan yang hanya mengasumsikan diri sebagai bagian yang sempit dari wilayah kekuasaan lingkup kerjanya melainkan dampak secara luas yang dapat diberikan dari aktifitas yang dilakukan, demikian pula dengan prinsip *Ahimsa*.

Perwujudan kepemimpinan nasional Indonesia, juga dimiliki bangsa Indonesia sebagai kondisi Moral kepemimpinan nasional (MKN) yang bersumber dari nilai dasar moral bangsa. Aktualisasi moral kepemimpinan berdasar Pancasila dalam kehidupan Pancagatra bermasyarakat, berbangsa dan bernegara penting terutama dengan semakin kuatnya hantaman dan tantangan pembangunan. Globalisasi yang tak tertahankan melalui mekanisme kemajuan teknologi, telekomunikasi, transportasi ataupun urbanisasi melalui Tourism, berimplikasi lahirnya pergeseran nilai yang secara luas terjadi pada seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Moral kepemimpinan nasional yang bersumber pada Pancasila tercermin secara terpadu dalam kelima sila Pancasila, yaitu :

1) Moral ketaqwaan dalam dimensi vertikal dan dimensi

horizontal. yaitu sikap dan perilaku pemimpin dalam ibadahnya secara konsisten menurut agama yang dianutnya dan sikap dan perilaku pemimpin yang melihat dirinya sama dengan orang-orang yang dipimpinya sebagai manusia ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga menghargai pekerjaan, mempercayai kemampuan, dan menghormati orang yang terpatri dalam kesehariannya sebagai pemimpin.

- 2) Moral kemanusiaan. adalah identik dengan sikap dan perilaku pemimpin yang menyadari adanya hak-hak asasi pada setiap manusia yang menjadi bawaan. HAM dilindungi, dibela dan diemban konsisten dengan perangkat aturan kebersamaan yang melapangkan aktualisasi HAM dalam batas-batas tanggung jawab sosial bermasyarakat. Aktualisasi HAM berkaitan erat pula dengan moral ketaqwaan dalam dimensi horizontal yang meluaskan berkembangnya hubungan- hubungan sosial yang saling menghargai dan saling menghormati diantara pemimpin dan yang dipimpin diantara sesama pemimpin dalam suatu tatanan kehidupan bermasyarakat.
- 3) Moral kebersamaan dan kebangsaan yaitu hal mana moral ketaqwaan dan moral kemanusiaan yang identik dengan semangat persatuan diantara sesama warga (pemimpin dan yang dipimpin). Ini merupakan kesadaran sebagai makhluk yang hidup dalam segala tantangan dengan berbagai keterbatasan, membutuhkan semangat kebersamaan dapat untuk mencapai dan memenuhi tujuan serta kebutuhannya. Apabila moral kebersamaan diterapkan dalam kehidupan bernegara maka terbangunlah semangat kebangsaan dan semangat pengabdian dalam kepemimpinan nasional yang lebih mengutamakan kepentingan nasional dari pada kepentingan pribadi dan golongan/kelompok maupun daerah.
- 4) Moral kerakyatan, Bahwa dalam kepemimpinan nasional ditandai oleh sikap dan perilaku keterbukaan (*transparency*), konsistensi (*consistency*) dan kepastian (*certainty*) dalam implementasi kebijakan. Moral kerakyatan adalah lanjutan

dari moral ketaqwaan, kemanusiaan dan kebersamaan yang mengharuskan pemimpin menyatu dengan mereka yang menjadi aspiratif, bebas dalam batas-batas kebersamaan berbangsa, dan pemimpin menjadi fasilitatif -dedikatif dan responsif-akomodatif terhadap tuntutan masyarakat.

- 5) Moral keadilan wujud kepemimpinan nasional ditandai oleh sikap dan perilaku keadilan dan kejujuran yang didasarkan pada tuntutan keimanan dan ketaqwaan. Moral keadilan berhimpitan dengan semangat kebersamaan dan kebangsaan serta kemampuan penyeimbangan pemenuhan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat. Moral keadilan menuntut perilaku kepemimpinan yang memiliki kredibilitas dan kemandirian.¹⁰

Kepemimpinan membawa arti adanya fenomena kompleks yang melibatkan pemimpin, pengikut, dan situasi. Ketiga elemen tersebut berinteraksi dalam hubungan saling membutuhkan sesuai kapasitas masing-masing, dimana pemimpin (personalitas, posisi, kepakaran, dsb), pengikut (kepercayaan, kepatuhan, pemikiran kritis, dsb), dan situasi (kerja, tekanan/stress, lingkungan).

Pemahaman atas proses kepemimpinan yang baik, dicermati bukan dengan hanya melihat sosok seorang pemimpin, tetapi juga pengikut, bagaimana pemimpin dan pengikut saling mempengaruhi, dan bagaimana situasi bisa mempengaruhi kemampuan dan tingkah laku pemimpin dan pengikut. Substansi kerangka tersebut adalah bagaimana menciptakan kepemimpinan dalam harmoni yang menciptakan output kehidupan masyarakat yang optimum dalam mencapai cita-cita nasional dan tujuan nasional, sebab merupakan hasil interaksi sinergitas dari pemimpin, pengikut dan situasi.

¹⁰ Materi Lemhannas, 2008. *Kepemimpinan Nasional*, Lemhannas, Jakarta, hlm. 36-37

Mencermati kehidupan kebangsaan yang penuh dengan perkembangan pasca reformasi, dimana pengaruh kuat globalisasi. Rusaknya pertahanan nilai-nilai identitas kebangsaan yang relatif bagi komunitas bangsa, memiliki implikasi moralitas yang lebih kuat, sebab langsung terasa karena terpatrit dalam jiwa dan kehidupan masyarakat. Munculnya kehidupan masyarakat dengan eksklusivitas yang meluas, *mutual distrust* yang semakin parah, *inequality frustration* yang mendalam, dan *disengagement* yang akut merupakan dampak terdalam atas implementasi nilai-nilai dasar kehidupan kebangsaan Indonesia yaitu Pancasila dengan pengaruh global dalam kehidupan utamanya para pemimpin yang secara budaya diyakini melekat esensi yang baik bagi masyarakat.

Harus dipahami bahwa, terdapat sisi manusia yang rasional dan emosional pada kehidupannya, yang dapat membawa implikasi adanya perbedaan pemikiran, feelings, pengharapan, mimpi, kebutuhan, ketakutan, ambisi dan tujuan. konsekuensinya, pemimpin dituntut untuk konsisten dalam kerangka aktualisasi nilai-nilai kearifan yang digunakan secara cerdas dengan pendekatan rasional dan emosional dalam mempengaruhi pengikut dan lingkungan aktifitasnya. Ini untuk menjaga tidak terjadinya distorsi yang terlalu jauh antara berbagai komponen tersebut, sebab dibutuhkan kesamaan persepsi dalam bentuk cara pandang terhadap bangsa dalam mewujudkan ketahanan nasional sebagai kerangka utama kehidupan kebangsaan.

Proses kepemimpinan negara tentulah berbeda dengan proses kepemimpinan organisasi lain. Kepemimpinan negara sangat kompleksnya variabel yang mempengaruhinya sebab struktur tertinggi dari pengelolaan manusia. Harus ada *blue print* kepemimpinan utama dalam bentuk capaian pembangunan untuk dijadikan indikator keberhasilan penyelenggaranya.

Keadaan yang terjadi di Indonesia saat ini, dapat menggambarkan bahwa para pemimpin bangsa tidak mampu memahami esensi utuh

kerangka kearifan masyarakat dalam menjalani kehidupan kepemimpinannya sebagaimana tertuang dalam kepemimpinan Pancasila. Dampaknya adalah meluasnya korupsi pada aparat pemerintah, ketidakpercayaan masyarakat bahkan pembangkangan. Kasus yang menjadi tamparan atas mekanisme kepemimpinan nasional adalah tidak jalannya sinkronisasi jalur kepemimpinan yang terpangkas atas nama demokrasi yang cenderung menjadi mobokrasi dengan ketidak konsistenan para pemimpin bangsa untuk memilih sebuah pilihan kebijakan sebagai komitmen bersama. Kenyataan lain, setiap saat dalam nuansa otonomi daerah setiap identitas etnik dan kewilayahan menuntut adanya wilayah politik pemerintahan bagi entitas etniknya masing-masing.

Penentuan persyaratan dalam seleksi kepemimpinan di Indonesia sebagai salah satu langkah yang mesti terbenahi terkait dengan kondisi nasional legitimasi sebagai kerangka dasar kepemimpinan telah mendapatkan input dari berbagai kompoenen seperti persyaratan; Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berdedikasi tinggi dan Loyal terhadap NKRI, memiliki integritas terhadap NKRI, Tidak pernah melakukan pelanggaran perundang-undangan, Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945 dan cita- cita Proklamasi 17 Agustus 1945, Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya.¹¹

Adanya prasyarat, perundangan dan berbagai variabel yang mesti dipenuhi secara formalistik, tidak akan dapat mewujudkan kepemimpinan nasional yang kokoh jika tidak terdapat keinginan dan kesadaran dalam diri seluruh komunitas bangsa untuk melaksanakan secara konsisten berbagai esensi dasar nilai-nilai pancasila yang menopang kepemimpinan nasional. Terwujudnya kepemimpinan nasional harus disertai kesatuan cara pandang terhadap bangsa dalam wujud pemahaman dan implementasi nilai

¹¹ Baca juga syarat yang diberikan oleh IKAL (ikatan alumni Lemhannas) untuk penentuan persyaratan seleksi kepemimpinan nasional Indonesia

dasar ideologi bangsa. Dengan implementasi yang terarah dan didukung oleh rasa tanggung jawab bangsa maka perwujudan kepemimpinan nasional akan sangat kokoh dan mampu menjadi panutan yang dipercaya seluruh masyarakat dan dihargai dimata dunia internasional.

KESIMPULAN

Implementasi nilai-nilai Pancasila merupakan kebutuhan sebagai kongkritisasi penerapan ideologisasi idealistik bangsa indonesia secara konsisten dan terarah dalam berbagai aktifitas kehidupan kebangsaan, dimana seluruh komponen bangsa konsisten hingga mampu menghindarkan kondisi yang dapat mengganggu perjalanan pengelolaan bangsa dalam mencapai cita-cita dan tujuan nasional sehingga pembangunan menjadi lebih terarah dan terencana yang merupakan wujud kepemimpinan nasional yang kokoh.

Mekanisme Implementasi yang sistematis, terus menerus dan melibatkan berbagai komponen bangsa, akan memiliki ketahanan dan kekenyalan sehingga mampu melakukan pembaharuan atau reformasi internal setiap saat secara terus menerus sehingga mampu bertahan terhadap goncangan-goncangan baik nasional maupun global dalam mewujudkan kepemimpinan nasional sebagai hakekat dasar yang menghubungkan sinergitas nilai-nilai kerakyatan dan esensi kepemimpinan yang didasarkan atas falsafah hidup Pancasila sebagai identitas utama bangsa.

Terwujudnya kepemimpinan nasional yang kokoh adalah kondisi dimana sebuah sistem yang terbentuk, mendukung mekanisme kepemimpinan nasional yang dikukuhkan oleh dukungan dan penerimaan seluruh komponen masyarakat sebagai proses yang dipercaya dapat menciptakan keadilan bagi masyarakat yang dengan itu menjadi proses yang diterima dijadikan sebagai panutan masyarakat dalam asumsi kepemimpinan yang didalamnya

berintikan worth and goodness yang bersumber dari nilai-nilai identitas kebangsaan yaitu Pancasila.

Inkonsistensi atas nilai-nilai Pancasila dalam perwujudan kepemimpinan nasional, telah terbukti dan akan membawa bangsa dalam suasana yang kacau karena cenderung membawa warga bangsa dalam suasana tak menentu. Kekisruhan proses rekrutmen kepemimpinan terjadi dimana-mana, konflik baik vertikal maupun horizontal banyak terjadi, hal ini karena terjadinya ketidakpercayaan (*distrust*) dan keteladanan yang hilang (*patron*) dalam kepemimpinan nasional.

Kemasa depan dibutuhkan implementasi nilai-nilai pancasila sebagai kebutuhan mendesak sehingga mesti terdapat pelembagaan mekanisme penyebarluasannya dengan melibatkan kelembagaan negara terkait, Perguruan tinggi, elemen kelompok masyarakat, dan media massa. Hal lain adalah, Harus adanya mekanisme yang sistematis terkait pelembagaan implementasi nilai-nilai pancasila secara terstruktur bagi seluruh komponen bangsa. Penting dikembangkannya wacana melalui media massa akan kondisi empirik yang diciptakan dalam cermin diri pada Pancasila sebagai paradigma diri dan kebangsaan Indonesia. dialog dan mekanisme ilmiah harus didorong untuk menciptakan iklim sehat dalam pengembangan dan sosialisasi identitas kebangsaan sehingga timbul menjadi sebuah kebutuhan atas nilai tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Sujatno (cet. Keempat), 2007, *Moral dan Etika Kepemimpinan*, Team 4AS, Jakarta.
- DR. Kaelan, M.S. ed. Ketujuh, 2003. *Pendidikan Pancasila, Paradigma*, Yogyakarta.
- Dr. Soerjanto Poespowardojo dkk, 2008. *Materi Pancasila dan UUD 1945, Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa*, Lemhannas, Jakarta.

- , 2008. Materi Pancasila dan UUD 1945, *Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka dan Ideologi Nasional*, Lemhannas, Jakarta.
- Muladi & Adi Sujatno, 2008. *Traktat etis Kepemimpinan Nasional*, RM. Books, Jakarta.
- Ryass Rasyid, Prof. DR., MA, 1995, *Konsep Dasar Kepemimpinan Pemerintahan*, Yayasan Karya Dharma , IIP, Jakarta.
- , 2007. *Makna Pemerintahan, Tinjauan dari segi etika dan kepemimpinan*, Mutiara Sumber Widya, Jakarta.
- Soedarsono Mertoprawiro, 1982. *Implementasi Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa dan Dasar Negara Indonesia Dalam Kehidupan Sehari-Hari*, PN. Balai Pustaka, Jakarta.
- Sondang P. Siagian, cet ketiga, 2003. *Teori dan Praktek Kepemimpinan*, Rineka Cipta, Jakarta.